

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan pilar utama yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan utama pembangunan ekonomi ini tentu saja bukan hanya sekedar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam indikator makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saja, melainkan juga mencakup aspek pemerataan yang mana ini berupa manfaat yang bisa dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Triani (2024), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang tidak hanya mengejar pertumbuhan pada angka-angka makroekonomi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan yang baik bukan hanya berdasarkan naiknya angka PDRB, tetapi juga bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan hasil pembangunan. Pernyataan ini sesuai dengan pesan yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi namun yang hanya menikmati hasilnya cuma sebagian kecil masyarakat saja, maka pembangunan tersebut dinilai belum berhasil secara menyeluruh. Pembangunan harus mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan serta dapat dinikmati oleh berbagai macam golongan masyarakat (Todaro & Smith 2014).

Keadilan dalam distribusi pendapatan dapat dijadikan sebagai tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil. Distribusi pendapatan yang merata merupakan aspek krusial dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang terbuka dan berkelanjutan. Jika ketimpangan terlalu tinggi dapat menghambat mobilitas sosial, memperlebar jurang ekonomi antar kelompok masyarakat, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan itu sendiri. Menurut Todaro & Smith (2014), distribusi pendapatan

yang tidak merata akan menimbulkan ketimpangan sosial, dimana pada gilirannya mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di Indonesia isu ini juga menjadi perhatian serius, Wahyudi (2023) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan di banyak daerah turut disebabkan oleh distribusi pengeluaran pemerintah yang belum merata, sehingga dibutuhkan strategi pemerataan yang lebih efektif yang bertujuan untuk memberikan manfaat pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan agar hal ini bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Kurangnya pemerataan distribusi pendapatan sering kali berujung pada ketimpangan pendapatan yang makin melebar dari tahun ke tahun. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pendapatan antar individu, kelompok, atau wilayah. Ketimpangan pendapatan ini bisa berakibat untuk bermacam permasalahan dibidang sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan relatif, kurangnya akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan), hingga potensi munculnya konflik sosial. Dalam temuannya Saputra & Zulham (2023) berpendapat bahwa ketimpangan ini muncul ketika ada kesenjangan signifikan dalam pendapatan masyarakat, baik antar individu maupun antar wilayah. Ketika ketimpangan semakin tinggi, dampaknya tidak sekedar pada sektor ekonomi, akan tetapi bisa melemahkan stabilitas sosial serta memperbesar jurang kemiskinan. Hal ini membuat banyak masyarakat, terutama di daerah tertinggal, tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu isu pembangunan yang paling kompleks. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka yang relatif meningkat dari masa ke masa, namun pada kenyataannya tidak semua kalangan masyarakat bisa merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut secara adil. Satu sisi tumbuh pesat dengan pusat-pusat ekonomi yang modern, sementara sisi lain terutama daerah-daerah terpencil atau berbasis pertanian tradisional justru mengalami ketertinggalan yang amat jauh. Ketimpangan ini bukan hanya terlihat antar individu, tetapi juga antarwilayah, di mana pulau-pulau besar seperti Jawa menguasai sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara wilayah lain seperti Maluku dan Papua hanya menyumbang porsi kecil.

Provinsi Sumatera Barat merupakan satu dari banyaknya contoh dari fenomena ketimpangan pendapatan ini. Meskipun provinsi ini memiliki kekayaan pada sumber daya alam dan budaya yang besar, ketimpangan pendapatan sampai periode penelitian ini tetap menjadi isu yang belum terselesaikan sepenuhnya. Berdasarkan data BPS tahun 2023, *Gini Ratio* Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 0,280, angka yang secara teoritis termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Namun demikian, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas ketimpangan antar daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Gustini & Sentosa (2024) menunjukkan bahwa meskipun *Indeks Williamson* Sumatera Barat tergolong rendah, yang menandakan ketimpangan antar wilayah tidak mencolok, namun ketimpangan antar individu sangat tinggi, dengan *Gini Ratio* pada level mikro mencapai 0,79. Fakta ini menunjukkan adanya potensi “ketimpangan tersembunyi” yang tidak tampak jika hanya melihat data agregat provinsi.

Meskipun secara agregat menunjukkan perkembangan ekonomi yang positif, tidak semua daerah mengalami kemajuan yang setara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks gini, sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan fluktuasi dan tidak konsistennya tren penurunan ketimpangan pendapatan dari tahun 2015-2023. Beberapa daerah seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh menikmati pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta mutu pembangunan manusia yang relatif baik. Sedangkan pada kabupaten yang berada di wilayah terpencil dan kurang berkembang, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Kabupaten Pasaman Barat, belum sepenuhnya memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan dasar serta peluang ekonomi yang kemudian menciptakan jurang ketimpangan dengan daerah lainnya.

Ketimpangan yang terjadi di Sumatera Barat, dapat kita lihat melalui rasio gini pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Tabel *Gini Ratio* Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2015-2023

Kab/Kota	Tahun									Penurunan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sumatera Barat	0.34	0.33	0.318	0.321	0.306	0.305	0.306	0.3	0.28	17.65%
Kab.Kep.Mentawai	0.28	0.31	0.319	0.306	0.336	0.273	0.321	0.233	0.259	7.50%
Kab.Pesisir Selatan	0.28	0.27	0.299	0.255	0.246	0.264	0.253	0.246	0.259	7.50%
Kab.Solok	0.29	0.31	0.294	0.303	0.285	0.277	0.246	0.243	0.235	18.97%
Kab.Sijunjung	0.29	0.33	0.333	0.3	0.293	0.269	0.27	0.243	0.263	9.31%
Kab.Tanah Datar	0.33	0.3	0.262	0.288	0.278	0.273	0.25	0.251	0.26	21.21%
Kab.Padang Pariaman	0.3	0.26	0.28	0.296	0.297	0.257	0.269	0.245	0.257	14.33%
Kab.Agam	0.31	0.29	0.279	0.257	0.251	0.278	0.272	0.298	0.255	17.74%
Kab.LimaPuluhKota	0.33	0.27	0.262	0.283	0.238	0.222	0.244	0.208	0.194	41.21%
Kab.Pasaman	0.3	0.3	0.26	0.266	0.33	0.31	0.248	0.23	0.243	19.00%
Kab.Solok Selatan	0.38	0.31	0.299	0.309	0.295	0.307	0.277	0.253	0.271	28.68%
Kab.Dharmasraya	0.36	0.3	0.252	0.264	0.278	0.28	0.268	0.287	0.291	19.17%
Kab.Pasaman Barat	0.29	0.31	0.286	0.29	0.283	0.258	0.261	0.277	0.238	17.93%
Kota Padang	0.35	0.35	0.338	0.344	0.312	0.312	0.343	0.354	0.312	10.86%
Kota Solok	0.34	0.34	0.299	0.296	0.271	0.286	0.277	0.288	0.256	24.71%
Kota Sawahlunto	0.33	0.32	0.299	0.31	0.289	0.3	0.295	0.314	0.308	6.67%
KotaPadang Panjang	0.37	0.38	0.3	0.29	0.322	0.394	0.306	0.296	0.273	26.22%
Kota Bukittinggi	0.34	0.33	0.313	0.337	0.267	0.265	0.286	0.317	0.255	25.00%
Kota Payakumbuh	0.37	0.34	0.303	0.302	0.276	0.325	0.316	0.311	0.316	14.59%
Kota Pariaman	0.33	0.34	0.301	0.316	0.3	0.31	0.301	0.272	0.289	12.42%

Sumber: BPS (2025)

Secara umum, nilai *Indeks Gini* Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,34 pada tahun 2015 menjadi 0,28 pada tahun 2023, atau turun sekitar 17,65%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan di tingkat provinsi. Namun, jika dilihat secara lebih rinci pada level kabupaten/kota, terlihat adanya variasi ketimpangan yang cukup mencolok antar daerah. Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penurunan sebesar 41,21%, menjadi daerah dengan perbaikan ketimpangan tertinggi di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di daerah ini membaik cukup cepat dibandingkan daerah lain. Sebaliknya Kota Sawahlunto (6,67%), Kabupaten Kepulauan Mentawai (7,5%), dan Kabupaten Sijunjung (9,31%). Angka ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendapatan di daerah-daerah tersebut berjalan lebih lambat.

Meskipun *Gini Ratio* Sumatera Barat secara agregat berada pada kisaran 0,28 sampai dengan 0,3 yang dikategorikan sebagai ketimpangan sedang, namun penelitian oleh Gustini & Sentosa (2024) dan Amelia & Guswandi (2023) menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang cukup tajam di tingkat individu dan antar kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kota Padang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Solok Selatan memiliki *Gini Ratio* di atas 0,31, sedangkan kabupaten seperti Lima Puluh Kota dan Pasaman berada di bawah 0,22. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan spasial dan sosial yang tidak dapat ditangkap hanya dengan melihat *Gini Ratio* rata-rata provinsi.

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat tidak terlepas dari pengaruh sejumlah faktor struktural yang turut berperan dalam memperlebar atau memperkecil ketimpangan antarwilayah maupun antar individu, seperti tingkat pengangguran, jumlah penduduk, upah minimum, inflasi, serta investasi. Penelitian oleh Jonardi & Harahap (2024) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan kontribusi sebesar 56,3% terhadap variasi ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Sumatera Barat. IPM memiliki pengaruh negatif signifikan, yang berarti peningkatan mutu sumber daya manusia tentu bisa menurunkan ketimpangan. Sebaliknya, variabel PDRB, kemiskinan, dan pengangguran justru menunjukkan hubungan positif, mengindikasikan bahwa peningkatan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Julihanza dan Khoirudin (2023) menambahkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Sumatera. Kenaikan upah minimum dapat memperkecil disparitas pendapatan, khususnya di daerah yang didominasi oleh sektor informal. Namun, variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi ditemukan tidak signifikan, yang memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis membawa pemerataan. Sementara itu, Amelia & Guswandi (2023) menemukan bahwa meskipun disparitas antar wilayah di Sumatera Barat secara spasial tergolong rendah (*Indeks Williamson* = 0,31), tetapi ketimpangan pendapatan individu sangat tinggi, tercermin dari *Gini Ratio* sebesar 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa

ketimpangan lebih terasa dalam konteks antar individu dibanding antarwilayah, dan menandakan perlunya kebijakan yang mendorong pemerataan peluang ekonomi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ketimpangan ini dan akan diteliti oleh penulis di antaranya adalah pengeluaran pemerintah daerah per kapita, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta IPM. Pengeluaran pemerintah daerah per kapita menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dan mendistribusikan sumber daya fiskalnya bagi setiap penduduk di wilayahnya. Variabel ini dihitung dengan membagi total realisasi belanja daerah dengan jumlah penduduk. Dengan menggunakan indikator per kapita, pengukuran menjadi lebih adil karena memperhitungkan besarnya jumlah penduduk. Kabupaten/kota yang memiliki APBD besar tetapi jumlah penduduknya juga besar, belum tentu memiliki nilai pengeluaran per kapita yang tinggi. Sehingga variabel ini penting untuk dianalisis karena lebih mampu mencerminkan rata-rata manfaat belanja publik yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan syarat utama untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu daerah. Hal ini ditandai dengan peningkatan PDRB, namun tentu ini tidak selalu menggambarkan distribusi kesejahteraan yang adil. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya berkonsentrasi pada kota-kota besar atau sektor tertentu seperti industri dan jasa, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran atau bekerja di sektor informal sering kali tidak merasakan dampak yang signifikan. Hal ini yang kemudian memperkuat jurang kesenjangan antarwilayah maupun antar kelompok (Arum, 2023).

Selain itu, dari sudut pandang teori ekonomi publik dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menurunkan ketimpangan melalui pengelolaan belanja publik dan intervensi sosial. Pengeluaran pemerintah yang ditujukan pada sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan berpotensi mempersempit jurang pendapatan. Namun, ketika alokasi anggaran tidak merata atau terserap hanya pada belanja rutin, maka perannya dalam menurunkan ketimpangan menjadi sangat terbatas.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan dalam ketimpangan pendapatan. Studi Saputra & Zulham (2023) menegaskan

bahwa kemiskinan yang tinggi dapat memperkuat struktur pendapatan yang timpang, karena sebagian besar manfaat pembangunan hanya dirasakan oleh kelompok yang berkuasa. Kondisi ini menciptakan lingkaran yang sulit diputus, dimana ketika pendapatan rendah, maka akses terhadap layanan dasar juga terbatas, begitu pun sebaliknya keterbatasan akses tersebut mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan pendapatan di masa depan. Akibatnya, kesenjangan antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok berpendapatan menengah dan tinggi semakin melebar.

Sesuai dengan penelitian Jonardi & Harahap (2024) yang menjelaskan tentang jumlah penduduk miskin mempunyai kontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi ketimpangan di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan kata lain, selama angka kemiskinan tetap tinggi, maka upaya menurunkan ketimpangan akan selalu terbatas. Kehadiran kelompok masyarakat miskin menunjukkan bahwa ada bagian dari penduduk yang masih tertinggal jauh dari arus pembangunan. Mereka bukan hanya menghadapi keterbatasan dalam pendapatan, tetapi juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan, maupun peluang untuk memperoleh pekerjaan yang bermutu.

Terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan. IPM menggambarkan mutu kehidupan masyarakat melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, serta daya beli. Daerah dengan IPM yang tinggi umumnya mempunyai akses yang lebih baik dalam menerima pelayanan publik serta peluang ekonomi yang mampu mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata. Penelitian Gustini & Sentosa (2024) juga mendukung ini, ditemukan bahwasanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berkorelasi negatif terhadap ketimpangan pendapatan dimana ini dapat diartikan semakin tinggi kualitas pembangunan manusia maka semakin rendah ketimpangannya.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, maka penulis membatasi penelitian ini pada empat variabel utama dimana keempat variabel ini merepresentasikan dimensi fiskal,

pertumbuhan ekonomi, serta kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pengaruh variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di masing-masing daerah. Selain bertujuan mengisi kekurangan studi yang mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam analisis data panel selama sembilan tahun terakhir, peneliti memilih Sumatera Barat karena adanya potensi “ketimpangan tersembunyi” yang justru menjadi menarik untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan konteks lokal guna mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah ada, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis seberapa besarnya dampak pengeluaran pemerintah daerah per kapita pada ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat
2. Untuk menganalisis seberapa besarnya dampak pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis seberapa besarnya dampak Kemiskinan pada ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat
4. Untuk menganalisis seberapa besarnya dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan menghadirkan sejumlah kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan mampu berperan sebagai jembatan dalam pemahaman serta sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang ekonomi pembangunan. Dengan menganalisis faktor-faktor seperti Pengeluaran Pemerintah per kapita, pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan IPM terhadap Rasio Gini, diharapkan mampu memperkaya kajian serta sumber rujukan untuk penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Dengan menyoroti kondisi di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat, studi ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris yang komprehensif terkait faktor-faktor penyebab ketimpangan. Temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan serta peningkatan efektivitas dalam menekan ketimpangan pendapatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini menitikberatkan analisis pada 19 wilayah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini memanfaatkan data penelitian selama rentang waktu 2015 hingga 2023.

